



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

177 Proyek Terancam Batal

Belum Masuk ke ULP, Dewan Meradang

BENGKULU - Banyaknya paket lelang tahun anggaran 2018 yang belum masuk ke ULP hingga pertengahan Juli ini diduga disengaja karena terkait adanya rencana rasionalisasi anggaran pada APBDP mendatang. Dari total 377 paket kegiatan, baru 200 paket yang masuk ke ULP. Sisanya 177 paket terancam tidak bisa terlaksana karena tutup tahun anggaran yang hanya menyisakan waktu lima bulan lagi.

☞ Baca 177 PROYEK.. Hal 15

Sambungan dari hal 9

Dibalik itu, muncul informasi bahwa sejumlah paket tersebut sengaja belum diserahkan ke ULP untuk dilelang, karena ada dugaan akan dilakukan rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi anggaran ini informasinya akan dilakukan dalam APBD Perubahan 2018 mendatang.

Penelusuran **RB**, salah satu paket proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu yang belum masuk ke ULP adalah perbaikan jembatan Sungai Rupert dengan pagu anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Waka II DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, SE I meradang mengetahui informasi banyaknya paket yang belum masuk ke ULP, karena adanya dugaan rencana rasionalisasi anggaran. Dengan tegas ia mengingatkan pihak eksekutif, agar tidak ada kegiatan-kegiatan fisik yang ditunda atau tidak dikerjakan karena sudah dianggarkan.

"Jangan coba-coba memblokir anggaran yang sudah disepakati bersama antara TAPD dengan banggar. Tidak ada rasionalisasi anggaran! Kalau mau rasionalisasi anggaran harus dibahas dengan DPRD. Eksekutif itu pada dasarnya melaksanakan APBD, sedangkan fungsi anggaran ada di DPRD. Coba saja kalau ada yang berani memblokir anggaran," tegas Suharto.

Sementara itu Plt Gubernur Bengkulu

Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.MA saat dikonfirmasi membantah akan adanya rencananya rasionalisasi. Namun ia tak membantah akan adanya rencana penyesuaian anggaran di APBD Perubahan 2018 nanti. "Enggak ada rasionalisasi anggaran. APBDP itu nanti akan dibahas bersama banggar dan TAPD. Bukan rasionalisasi, mungkin maksudnya penyesuaian," kata Rohidin.

Rohidin juga mengomentari soal masih banyaknya paket pekerjaan, terutama proyek fisik yang belum masuk ke ULP. Bahkan yang sudah lelang pun masih banyak yang belum dimulai pekerjaannya. "Terkait beberapa paket yang belum bergerak, mudah-mudahan secepatnya bisa dilelang dan dikerjakan. Itu yang kita harapkan," ujar Rohidin.

Terpisah, Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Oktaviano, ST, M.Si mengatakan bahwa dirinya belum tahu apakah nanti akan ada rasionalisasi anggaran atau tidak. "Saya belum dapat arahan dari pak sekda yang mana-mana yang akan dirasionalisasikan. Yang jelas saat ini kami masih fokus pada semua kegiatan, semuanya masih jalan. Karena sebelum ada perintah secara resmi kami tetap akan melaksanakan semuanya," jelas Okta.

Kalaupun nanti memang harus dirasionalkan, lanjut Okta ia pastikan bahwa paket pekerjaan yang dirasionalkan itu hanya paket-paket kecil

dengan nilai anggaran dibawah Rp 200 juta. "Bisa jadi nanti kalau memang rasionalisasi, hanya paket-paket yang kecil saja yang nilainya dibawah 200 juta. Tapi sekarang kita belum mengarah ke situ karena kami belum dipanggil oleh tim TAPD," kata Okta.

Terakit dengan jembatan Sungai Rupert, Kabid Bina Marga Ujang Sehat membenarkan bahwa paket jembatan itu belum dimasukkan ke ULP. Ia pun mengaku tidak tahu apa alasan hingga proyek itu belum juga diserahkan ke ULP untuk dilelang. "Saya kan hanya sebagai bawahan. Ya sesuai perintah saja. Jadi saya tidak bisa jawab," kata Ujang.

Apakah paket jembatan tersebut termasuk salah satu item kegiatan yang akan dirasionalkan? Ujang juga tidak tahu. "Kalau jembatan itu belum tahu saya. Yang jelas proyek yang akan segera dikerjakan itu peningkatan jalan pariwisata Pantai Panjang Rp 19 miliar dan jalan Batang Hari Rp 6 miliar karena sudah lelang di ULP. Mudah-mudahan Agustus mulai berjalan," kata Ujang.

Mengenai paket jembatan Sungai Rupert tadi, kata Ujang kalau dirinya pribadi menginginkan proyek itu berjalan. "Terus terang saja, kalau maunya saya kalau bisa dikerjakan semua. Kalau ada yang tidak dikerjakan, PPTK kita banyak yang nganggur juga kan. Tapi ini anak buah saya sedang survey harga perkiraan sendiri (HPS) ke Jakarta dan besok (hari ini) baru kembali ke Bengkulu," ujar Ujang. (tew)